



Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover

Nong Ayu Triyanti Utami Hakim^{1*}, Daniel Pasaribu¹, Dina Fadiyah¹
¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, 15437, Banten - Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Jul 10, 2022

Diterima: Jul 19, 2023

Dipublikasi: Jul 30, 2023

KATA KUNCI:

Kebijakan; Makassar Recover;
Persepsi Publik.

KORESPONDEN:

**Nong Ayu Triyanti Utami
Hakim**

Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Terbuka

Email:

nongayu@ecampus.ut.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Hakim, N. A. T. U., Pasaribu, D., & Fadiyah, D. (2023). Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover. *Journal of Political Issues*, 5(1); 80-94.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study analyzes public perception of one of the efforts to prevent and control the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), namely the implementation of public policies contained in Makassar Mayor Regulation Number 5 of 2021 concerning Makassar Recover. Against this background, there are pros and cons from the community in various media regarding this policy since it was officially implemented, while the City Government of Makassar dares to say that the Makassar Recover policy is a flagship program. Based on these problems and taking into account the position of the community as a policy target that directly benefits and impacts, the researcher considers it important to know the public's perception of the Makassar Recover policy so that it becomes a reference material for policy improvement for the City Government of Makassar. This study uses Mixed Methode Research (MMR), which combines quantitative methods and qualitative methods. As for data collection techniques through distributing questionnaires to the people of Makassar City, observing and approaching the literature study. The results of the study show that although there is still resistance to this policy, the majority of the community agrees and provides support for the substance of the policy, the behavior of implementing officers, interaction of work networks, participation of target groups and resources in the Makassar Recover policy.

Abstrak Penelitian ini menganalisis persepsi publik terhadap salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), yaitu implementasi kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra masyarakat diberbagai media terhadap kebijakan ini sejak resmi diimplementasikan, sementara Pemerintah Kota Makassar berani mengatakan kebijakan Makassar Recover sebagai program andalan. Berdasarkan permasalahan tersebut dan dengan mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang merasakan manfaat maupun dampak secara langsung, peneliti menganggap pentingnya mengetahui persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recover agar menjadi bahan rujukan perbaikan kebijakan bagi Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan *Mixed Methode Research (MMR)* yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Makassar, melakukan pengamatan dan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih ditemukan penolakan terhadap kebijakan ini, namun sebagian besar masyarakat setuju dan memberikan dukungan terhadap substansi kebijakan, perilaku petugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya dalam kebijakan Makassar Recover.

TENTANG PENULIS:

Nong Ayu Triyanti Utami Hakim, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Tahun 2016. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka.

Daniel Pasaribu, Penulis menyelesaikan Master of Art in Taiwan and Regional Studies Program of Asia-Pacific Area Studies, National Dong Hwa University pada Tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka..

Dina Fadiyah, Penulis menyelesaikan studi S-2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2016. Penulis saat ini

PENDAHULUAN

Perjalanan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Indonesia disambut dengan berbagai upaya, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah diseluruh penjuru negeri dalam menekan penyebaran Covid 19. Berbagai kebijakan diluncurkan, mulai dari adanya aturan *Social and physical distancing*, karantina dari luar negeri, bekerja dari rumah dan sebagainya. Tujuan utamanya untuk memerangi dan menekan angka kematian akibat Covid 19. Salah satu kebijakan yang peneliti kaji adalah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover.

Disahkan menjelang 2 tahun adanya Pandemi Covid 19, kebijakan ini tak serta merta berjalan mulus. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, ditemukan berbagai masalah. Sebut saja penurunan *Tim Detector* pada pertengahan tahun 2021 secara *door to door* ditengah pandemi yang seharusnya mengurangi kontak langsung justru dilakukan secara tatap muka dan menuai penolakan masyarakat karena memicu kerumunan (Indozone, 2021). Selain itu, adanya masalah terkait pengadaan 153 kontainer sebagai posko Makassar Recover bernilai fantastis, yaitu dengan biaya pengadaan mencapai Seratus juta Rupiah untuk masing-masing kontainer. Sehingga anggaran yang digunakan untuk pengadaan kontainer ini mencapai Rp. 15.3 Miliar (Muin, 2021). Bukan hanya terkait anggaran, namun manfaat dari pengadaan kontainer ini menjadi gejalak di masyarakat. Fasilitas Makassar Recover belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Makassar. Adanya tumpang tindih antara fungsi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas dengan kontainer tim Makassar Recover menjadi salah satu alasan masyarakat urung untuk memanfaatkannya. Penempatan kontainerpun dianggap asal-asalan karena tak jarang ditempatkan disembarang tempat seperti bahu jalan (Muin, 2021).

Disamping itu, pendekatan yang dilakukan Pemkot Makassar yang cenderung intimidatif dan seolah-olah memaksa, mewarnai implementasi kebijakan ini. Dikemukakan oleh media massa mengungkapkan adanya pemecatan puluhan lurah dan camat di lingkungan Kota Makassar yang tidak mendukung program Makassar Recover di lapangan (Fauzan, 2021). Masyarakatpun yang tidak mendukung kebijakan ini terancam tidak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota Makassar (Mappiwali, 2021). Langkah-langkah tersebut dilakukan Pemkot Makassar guna mendapatkan dukungan publik dalam menyukseskan kebijakan ini. Seiring dengan pelaksanaannya yang satu sisi menuai kontra dari masyarakat, kekecewaan juga ditemukan dari sisi pelaksana kebijakan dilapangan, yaitu ditemukan sebanyak 15.000 orang detektor yang belum menerima gaji setelah mereka bekerja dan mendukung kebijakan ini (Munsir, 2021).

Masalah-masalah itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya pro kontra dukungan pada kebijakan yang dipelopori Walikota Makassar, Danny Pomanto. Kota Makassar sendiri dibandingkan dengan 23 Kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota yang cukup besar angka penyebaran Covid 19 dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Adanya kebijakan ini membantu Makassar menurunkan level penularan Covid 19 yang semula tingkatan 4 (empat) menjadi tingkatan 2 (dua), dengan kata lain kebijakan makassar recover dianggap berhasil menekan laju penyebaran Covid-19 (Herlina, 2021).

Menurut Thomas R. Dye (Hamdi, 2014), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini Pemkot Makassar memilih meluncurkan kebijakan Makassar Recover dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid 19. Pemkot Makassar berani mengatakan bahwa Makassar Recover sebagai program unggulan dan berhasil menekan angka kasus Covid-19 (Herlina, 2021). Namun perlu kita kaji lebih jauh apakah masyarakat merasakan hal yang sama dengan kebijakan ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan Makassar Recover di lapangan meliputi seberapa kenal masyarakat Kota Makassar mengetahui adanya kebijakan Makassar Recover dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover melingkupi seberapa jauh manfaat yang dirasakan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mengangkat isu kebijakan Makassar Recover, seperti *Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar* (Daming, dkk, 2021) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Makassar Recover memiliki tiga tahap, yaitu imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Ketiga tahap tersebut merupakan langkah strategis diawal kepemimpinan Moh. Pomanto dan Fatmawati Rusdi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Program ini dilakukan secara tersistem yaitu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, dan semua masyarakat Kota Makassar. Sementara terdapat 4 (empat) faktor yang ada di dalam implementasi kebijakan Makassar Recover yaitu, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap serta faktor struktur organisasi atau birokrasi.

Penelitian lainnya yang berjudul *Meningkatkan Imunitas Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Program Makassar Recover Ecosystem* (Giswanti, dkk., 2022) mengemukakan terkait Program Makassar Recover *Ecosystem* bermaksud untuk memberikan vitamin gratis ke masyarakat, vitamin tersebut berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia agar kuat melawan serangan virus Covid 19. Setiap dua pekan, akan ada evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Ada tiga faktor yang menjadi acuan dalam meningkatnya imunitas masyarakat, yaitu *pertama*, menurunnya tingkat positif, *kedua*, penurunan angka yang terkena Covid 19 dan yang *ketiga*, seluruh pintu masuk Makassar telah terpasang alat pendeteksi adanya virus corona (GeNose) yang baik dan cara lain yang dilakukan adalah pemeriksaan test PCR dan Swab yang wajib dilakukan guna memastikan positif atau negatif dari pemeriksaan Covid-19 (Giswanti, dkk., 2022).

Berdasarkan fokus kedua penelitian diatas yang mengemukakan pelaksanaan kebijakan Makassar mulai dari tujuan kebijakan, implementasi hingga layanan yang tersedia, belum adanya penjelasan terkait persepsi masyarakat baik sebagai sasaran maupun pelaksana dari kebijakan Makassar Recover, sehingga penting untuk mengetahui persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recover agar menjadi bahan rujukan perbaikan baik perumusan maupun pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid 19 bagi Pemerintah Kota Makassar, secara umum seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi kebaruan sudut pandang pelaksanaan kebijakan publik dari sudut pandang publik, maka peneliti mengkaji dalam sebuah artikel yang berjudul "Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover".

LANDASAN TEORITIK

Persepsi Publik

Persepsi menurut Riadi, merupakan suatu proses kognitif yang dialami setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian dan penafsiran masukan-masukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia (Riadi, 2020). Selain itu, pengertian persepsi menurut Pius A Partanto bahwa Persepsi adalah pengamatan; penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan; hal mengetahui, melalui indera; tanggapan (indera); daya memahami (Pius A Partanto, 2021). Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan maupun penerimaan seseorang terhadap suatu pengalaman, objek, kejadian ataupun sebuah informasi maupun pesan. Dari persepsi ini dapat diperoleh tanggapan yang positif maupun negatif tergantung pada kesesuaian manfaat para individu yang menerimanya, dalam hal ini tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai,

tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Terdapat 5 (Lima) faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Wijaya (Thoha, 2008) diantaranya, pertama, faktor lingkungan, yaitu bunyi, warna, sinar, sosial ekonomi, maupun politik. Dalam penelitian ini akan responden akan diberikan pertanyaan terkait latar belakang sosial dan ekonomi. Kedua, faktor konsepsi, yakni teori dan pendapat tentang manusia dengan semua tindakannya. Ketiga, faktor yang terkait dengan konsep tentang dirinya sendiri, kadang seseorang menganggap orang lain tidak baik, sedangkan dirinya sendiri selalu baik, maupun sebaliknya. Keempat, faktor motif dan tujuan, yaitu berkaitan dengan tujuan dan dorongan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan. Kelima, faktor pengalaman masa lalu, latar belakang dan pengalaman kehidupan seseorang pada waktu kecil, pasti akan menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi perilakunya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tanggapan masyarakat Kota Makassar sebagai sararan kebijakan Makassar Recover, apakah isi dan tujuan dari kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak berdasarkan persepsi masing-masing individu.

Kebijakan Publik

Anderson dalam (Islamy, 1997) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintah, dimana implikasinya adalah (1). Kebijakan publik pasti mempunyai tujuan ataupun tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisikan tindakan-tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik yaitu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang masih direncanakan untuk dilakukan. (4). Kebijakan publik yang bersifat positif, merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu sedangkan yang bersifat negatif yaitu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan. (5). Kebijakan publik yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta memaksa.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan model Mathland (Hamdi, 2014) dalam implementasi kebijakan dimana Mathland memberikan pemahaman implementasi kebijakan dalam bagian dari suatu proses kebijakan yang berisi langkah-langkah mengubah sebuah target atau perencanaan menjadi sebuah hasil. Target tersebut merupakan spesifikasi tujuan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi program-program yang lebih rinci, sehingga pengkajian implementasi kebijakan menurut Matland selalu menampilkan dua dimensi utama, yaitu determinan dan indikator. Indikator implementasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Implementasi Kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	Produktivitas	Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran
	Linearitas	Derajat Kesesuaian dengan standar (Prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, asset, dana dan teknologi)

Sumber: (Hamdi, 2014)

Sementara itu, determinan dari implementasi kebijakan mencakup faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 2 Determinan Implementasi Kebijakan Publik

Faktor	Indikator
Substansi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi isi kebijakan 2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain
Perilaku Petugas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi kerja 2. Kecenderungan penyalahgunaan wewenang 3. Kemampuan pembelajaran
Interaksi Jejaring kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar pelaksana 2. Hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan
Partisipasi kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan 2. Kemampuan kontribusi sesuai prosedur yang ada
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan dana 2. Ketersediaan pelaksana 3. Kecukupan peralatan 4. Ketersediaan informasi 5. Ketepatan teknologi

Sumber: (Hamdi, 2014)

Dimensi indikator dan determinan implementasi kebijakan publik diatas akan menuntun peneliti dalam membahas persepsi masyarakat, sehingga pembahasan lebih eksplisit dan terarah. Konsep diatas diturunkan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat Kota Makassar guna mengupas pandangan maupun persepsi masyarakat secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Mixed Methode Research (MMR), menurut Sugiyono (Sugiyono, 2011) adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus dalam suatu penelitian, sehingga hasil data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Dalam Penelitian ini desain metode penelitian campuran sekuensial eksplanatori, yaitu menggunakan data kualitatif untuk membantu menjelaskan data kuantitatif, dengan demikian pendekatan kuantitatif lebih kuat daripada pendekatan kualitatif (Ismail Pane, 2021).

Adapun teknik pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Makassar dan data kualitatif melalui observasi, studi pustaka referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis persepsi maupun berbagai referensi surat kabar baik dari media cetak maupun online. Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2022. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar yang tersebar di 15 kecamatan, namun mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka kami menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form.

Jumlah responden yang memberikan respon sebanyak 36 responden mengetahui kebijakan Makassar Recover dan 6 responden tidak mengetahui. Jumlah keseluruhan sebanyak 42 responden yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu Biringkanaya, Bontoala, Mamajang, Manggala, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate dan Ujung Tanah.

Data yang telah dikumpulkan oleh Peneliti, baik berupa dokumen maupun hasil kuesioner kemudian dilakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data yang sesuai, untuk dianalisis secara mendalam sesuai dengan kerangka penelitian dan penggunaan teori implementasi kebijakan dan persepsi masyarakat. Hasil analisa pengolahan data tersebut kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

Kerangka berpikir dari penelitian ini berawal dari kebijakan berupa Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memuat 3 hal besar, yaitu Makassar Recover Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Sementara untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam penelitian ini kita akan menggunakan indikator dan determinan implementasi kebijakan Model Mathland (Hamdi, 2014).

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover dimulai dari produktivitas yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan. Dengan asumsi linieritas berkaitan dengan semakin sesuainya proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, semakin sesuai maka dikatakan semakin linier. Sementara dari efisiensi sendiri menggambarkan semakin minimal penggunaan pelaksana, aset, dana dan teknologi yang semakin tepat dalam implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan maka dapat dikatakan implementasi kebijakan semakin efisien. Selain itu persepsi masyarakat akan menggambarkan determinan dari sudut pandang substansi kebijakan, sumberdaya, partisipasi kelompok sasaran, interksi jejaring kerja dan perilaku petugas pelaksana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu jajaran kota besar yang ada di Indonesia serta merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Sehingga Kota Makassar menjadi sorotan dalam berbagai aspek seperti perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Salah satunya penerapan Kebijakan Makassar Recover.



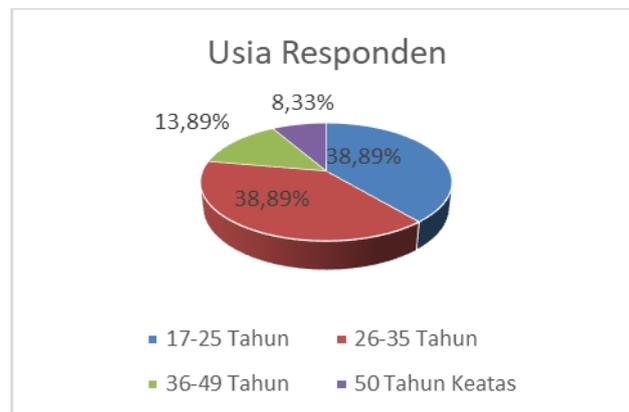
Gambar 1. Peta Kota Makassar

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar oleh peneliti, dari sebanyak 36 responden, setelah kebijakan Makassar Recover ini diterapkan selama hampir 2 (dua) tahun lamanya, masih ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini meskipun mayoritas sudah mengetahuinya. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar, yaitu "Makassar Recover" diketahui oleh mayoritas responden sejumlah 85,71% dan sisanya sebanyak 14,29% masih belum mengetahuinya. Hal ini berdampak pada persepsi masyarakat yang berkurang, karena peneliti fokus pada masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut.



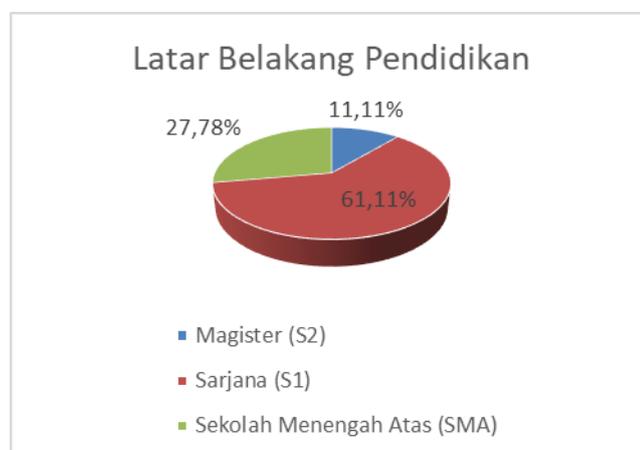
Gambar 2. Posko Kontainer Makassar Recover

Bagi responden yang tidak mengetahui kebijakan ini, maka tidak dapat melanjutkan pengisian pertanyaan kuesioner, sehingga pembahasan terkait persepsi masyarakat dibatasi hanya pada responden yang benar-benar mengetahui kebijakan Makassar Recover. Adapun persoalan masih ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya tersosialisasikan secara merata.



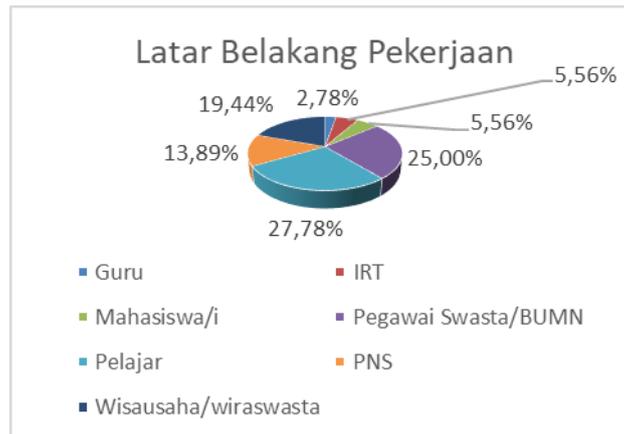
Gambar 3. Usia Responden

Responden dalam penelitian ini memiliki varian usia yang berbeda dengan rentang usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun sejumlah masing-masing 38.89%, rentang usia 36-49 tahun sebanyak 13.89% dan yang terakhir rentang usia 50 tahun keatas sebanyak 8.33%.



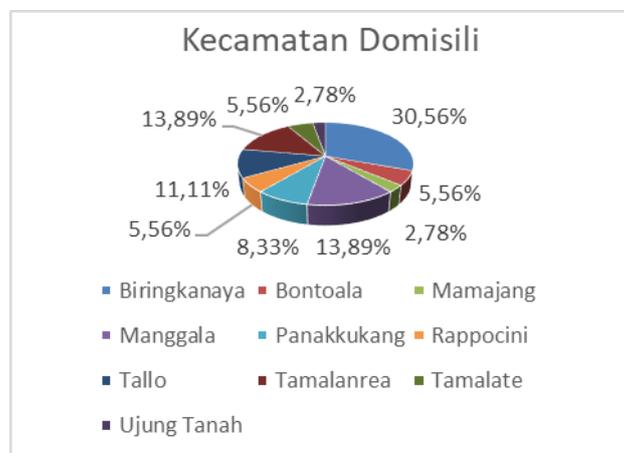
Gambar 4. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan gambar diatas, latar belakang pendidikan paling banyak adalah sarjana sejumlah 61.11%, disusul oleh Magister (S2) sebanyak 27.78% dan yang terakhir lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.11%.



Gambar 5. Latar Belakang Pekerjaan

Latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh responden adalah bervariasi dari yang terbanyak hingga yang terkecil yaitu Pelajar 27.78%, Pegawai Swasta/BUMN 25.00%, Wisausaha/wiraswasta 19.44%, PNS 13.89%, IRT 5.56%, Mahasiswa/i 5.56% dan Guru 2.78%.

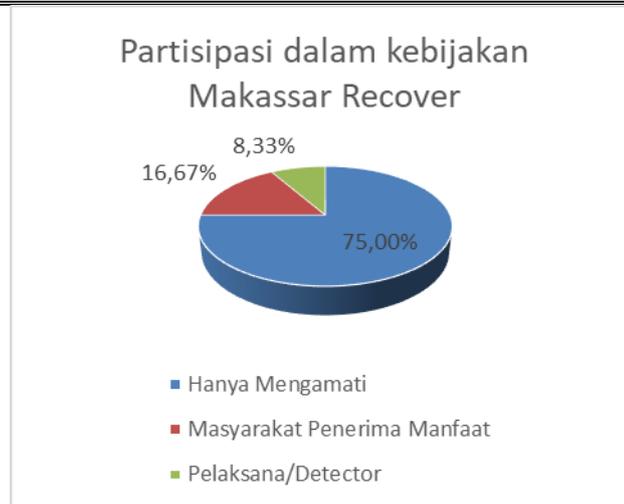


Gambar 6. Kecamatan Domisili

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 15 Kecamatan dengan 153 Kelurahan. Responden berdomisili pada 10 kecamatan dengan responden yang paling banyak berada pada kecamatan Biringkanaya sebesar 30.56%.

Peneliti menilai bahwa mengetahui latar belakang dari responden penelitian ini sangat penting agar diperoleh suatu persepsi masyarakat yang komprehensif. Selain latar belakang usia, peneliti juga meminta responden untuk mengisi latar belakang pendidikan, pekerjaan dan penyebaran kecamatan dimana responden tinggal (domisili). Hal ini perlu dilakukan agar kriteria responden sesuai dengan tujuan utama yaitu terbatas hanya pada masyarakat Kota Makassar sebagai sasaran kebijakan Makassar Recover.

Dari pengumpulan data berdasarkan kriteria diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada posisi sebagai pengamat dalam kebijakan Makassar Recover, disusul penerima manfaat dan yang terakhir adalah pelaksana kebijakan atau *detector*.



Gambar 7. Partisipasi dalam kebijakan Makassar Recover

Dapat diketahui pula bahwa sebagian besar responden berada pada posisi sebagai pengamat dalam kebijakan Makassar Recover, penerima manfaat dan yang terakhir adalah pelaksana kebijakan. Tingkat partisipasi responden dalam kebijakan Makassar Recover mayoritas tidak terlibat aktif sebagai penerima manfaat dan pelaksana/petugas namun hanya sebagai pihak yang mengamati sebesar 75%.

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Makassar Recover

Pada pembahasan penelitian ini akan dijelaskan terkait determinan dari implementasi kebijakan menurut Matland (Hamdi, 2014), seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu meliputi faktor substansi kebijakan, perilaku petugas pelaksana, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya, serta interaksi jejaring kerja. Kelima faktor tersebut digambarkan dalam beberapa indikator yang dipertanyakan kepada responden, sehingga diketahui bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover. Peneliti memberikan pertanyaan tertutup dengan bentuk skala likert paling sederhana agar mudah dipahami oleh responden dengan opsi sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tidak adanya opsi netral pada pertanyaan yang diajukan untuk menghindari responden mencari posisi aman dengan tidak memberikan pandangan dan sikap. Sehingga diharapkan hasil yang diperoleh merupakan kecenderungan persepsi sesungguhnya masyarakat Kota Makassar terhadap kebijakan Makassar Recover ini.

a. Analisis Persepsi terhadap Substansi Kebijakan

Mengkaji sebuah kebijakan publik hal yang paling pertama harus diketahui adalah substansi kebijakan itu sendiri. Menurut kbbi.web.id menyebutkan bahwa substansi adalah 1. watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti. Makassar Recover adalah singkatan *Smart Emergency Protocol Against Covid-19 and Service (Recover)*, yaitu adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dengan melalui protokol penanganan secara cepat dan terukur berkenaan dengan penanganan dan pelayanan Covid. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover, memiliki tujuan untuk meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, memahami dan melaksanakan adaptasi sosial untuk merubah perilaku baik di masa pandemi Covid-19, menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam memulihkan kembali otonomi daerah dan mewujudkan Makassar Pulih, sehat dan selamat dari pandemi Covid-19 (Pomanto, 2021).

Kebijakan ini ditetapkan sejak Maret 2021 ini merupakan kebijakan strategis dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat secara komprehensif, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan pada seluruh sektor kegiatan

dari hulu sampai hilir. Pelaksanaan Peraturan Walikota ini membutuhkan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan semua elemen masyarakat di daerah. Pelaku usaha memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi yang ada dalam kegiatan usaha dan besarnya mobilitas serta interaksi warga masyarakat dari aktivitas kerja.

Peneliti mengukur persepsi publik terhadap 2 (dua) indikator substansi kebijakan yaitu Konsistensi isi kebijakan dan Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain. Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat menunjukkan Kebijakan Makassar recover dinilai telah sesuai atau konsisten dengan kebutuhan dan dinyatakan oleh jawaban yang setuju sebesar 63.89%. Perlu diketahui bahwa pengesahan kebijakan Makassar Recover terjadi pada saat kondisi Pandemi Covid-19 tinggi, sehingga kemunculan kebijakan ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Selain itu kebijakan secara mayoritas dianggap tidak tumpang tindih dengan program lain:

Tabel 3 Persepsi Substansi Kebijakan

Substansi Kebijakan	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Kota Makassar	11.11	63.89	19.44	5.56
Tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya	8.33	66.67	16.67	8.33

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menganalisis bahwa persepsi masyarakat setuju terhadap substansi atau isi kebijakan Makassar Recover, yaitu Recover (Pomanto, 2021) adalah sembuh, pulih dan mendapatkan kondisi normal Kembali seperti sedia kala. Ada tiga tahapan yang dilakukan di kota Makassar yaitu Immunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Segala tahapan ini dilakukan serentak diseluruh wilayah kota Makassar dengan menggunakan kata Recover yang merupakan singkatan dari *smARt Emergency protocol against Covid-19 and sERvice*.

b. Analisis Persepsi terhadap Perilaku Petugas Pelaksanaan Kebijakan

Sebagai kebijakan penanggulangan Covid-19, Makassar Recover tentu memiliki petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dilapangan. Petugas tersebut salah satunya adalah detector yang memiliki kewajiban untuk mendata dan mendeteksi warga yang terpapar Covid-19 maupun kontak langsung dengan suspect. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perilaku petugas pelaksana kebijakan Makassar Recover, terdapat 3 (tiga) indikator perilaku petugas pelaksana yaitu Motivasi kerja, Kecenderungan penyalahgunaan wewenang dan Kemampuan pembelajaran.

Tabel 4 Persepsi Pelaku

Perilaku Petugas Pelaksana Kebijakan Makassar Recover	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Petugas memiliki motivasi kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah	2.78	77.78	13.89	5.56
Petugas melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang	2.78	75.00	16.67	5.56
Petugas memiliki kemampuan yang baik	13.89	63.89	16.67	5.56

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Gambaran perilaku petugas pelaksana kebijakan dapat dilihat pada tabel diatas. Petugas yang terlibat dalam Makassar Recover dinilai juga memiliki motivasi kinerja yang tinggi dan memberikan pelayanan yang ramah sebesar 77.78%. Petugas menurut responden juga melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang sebesar 75%. Petugas memiliki kemampuan/skill dalam menjalankan kebijakan makassar recover sebesar 63.89%.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Guntur (Guntur, dkk. 2022) bahwa Dimensi input menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Dimensi proses menunjukkan bahwa program Makassar Recover dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar dan peraturan yang ketat. Dimensi produk menunjukkan bahwa program Makassar Recover telah menghasilkan peran sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi dampak virus COVID-19 maupun adaptasi sosial, namun pemulihan ekonomi belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, perilaku petugas pelaksana kebijakan Makassar Recover berhubungan dengan kepuasan masyarakat penerima manfaat kebijakan ini. Peneliti menemukan masih adanya persepsi masyarakat yang tidak setuju dengan kondisi petugas yang memiliki ciri-ciri sebagai pelayan prima, yaitu memiliki kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, tidak menyalahgunakan wewenang dan memiliki kemampuan yang baik. Artinya, meskipun persepsi masyarakat setuju, h=sebaiknya menjadi catatan perbaikan petugas pelaksana kebijakan ini.

c. Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa

Interaksi jejaring kerja kebijakan penting dalam menjalankan suatu kebijakan, indikator dalam penelitian ini diantaranya adalah kerjasama dan koordinasi antar pelaksana dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan. Dalam hal ini tentunya setelah pemerintah Kota Makassar mengesahkan kebijakan, maka tingkat pemerintah dibawahnya seperti tingkat kecamatan, kelurahan bahkan tingkat RT/RW melakukan sosialisasi dan komunikasi demi kelancaran program.

Keberhasilan kebijakan publik dapat dicapai apabila pelaksana memenuhi syarat yaitu mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan secara jelas, tujuan dan sasaran kebijakan (Daming, dkk. 2021). Kondisi yang terjadi, komunikasi antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan berupa instruksi atau petunjuk yang bersifat satu arah, sementara komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Makassar dan penerima kebijakan yaitu masyarakat Kota Makassar berjalan secara dua arah.

Persepsi publik mengungkapkan bahwa indikator interaksi jejaring kerja kebijakan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5 Interaksi Jejaring Kerja

Interaksi Jejaring kerja Kebijakan	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Memiliki kerjasama antar pelaksana yang baik	11.11	72.22	11.11	5.56
Memiliki hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan	5.56	83.33	2.78	8.33

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kerjasama antar pelaksana yang baik dinilai telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana sebesar 72.22%. Sesuai data terlihat bahwa hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan sebesar 83.33% dinyatakan setuju. Responden menyatakan bahwa kedua indikator tersebut memegang peranan penting dalam berjalannya suatu kebijakan. Analisis peneliti masih terdapat pro kontra persepsi masyarakat terkait

interaksi jejaring kinerja kebijakan, hal ini dapat menjadi masukan Pemkot Makassar untuk lebih meningkatkan harmonisasi dalam kerjasama dengan berbagai pihak.

d. Analisis Persepsi terhadap Partisipasi kelompok Sasaran Makassar Recover

Sasaran dalam kebijakan Makassar Recover adalah masyarakat Kota Makassar. Artinya masyarakat kota Makassar secara umum merupakan sasaran penerima manfaat dan pengguna layanan kebijakan tersebut. Selain itu, pelaksana kebijakan dilapangan atau petugas berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat berkontribusi sekaligus menerima manfaat.

Manfaat yang dimaksud dalam kebijakan ini yaitu pada imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Dalam penelitian ini Indikator yang digunakan adalah Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan Kemampuan kontribusi sesuai prosedur yang ada.

Tabel 6 Partisipasi Kelompok Sasaran

Partisipasi kelompok sasaran Makassar Recover	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Masyarakat menerima manfaat kegiatan Makassar Recover	11.11	69.44	13.89	5.56
Masyarakat berkontribusi sesuai prosedur yang ada	5.56	69.44	19.44	5.56

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, responden masyarakat telah menerima manfaat sebesar 69.44%. Partisipasi kelompok sasaran Makassar Recover, Masyarakat telah berkontribusi sesuai prosedur yang ada sebesar 69.44%.

e. Analisis Persepsi terhadap Kecukupan Sumber Daya

Keberlangsungan sebuah kebijakan tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya yang menunjang mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Kesuksesan sebuah kebijakan dapat dilihat dari kecukupan sumber dayanya. Indikator Sumber daya sendiri meliputi Kecukupan dana, Ketersediaan pelaksana, Kecukupan peralatan, Ketersediaan informasi dan Ketepatan teknologi.

Berbicara dengan kecukupan dana dalam pelaksanaan kebijakan Makassar Recover, Pemkot Makassar mengeluarkan dana senilai 100 juta per kontainer, satu kontainer ditempatkan untuk satu kelurahan, sehingga jumlah total yang dikeluarkan sebanyak 15.3 Miliar (Muin, 2021). Artinya, Pemkot sebenarnya memiliki kemampuan dari segi pendanaan meskipun menuai polemik dan dianggap pemborosan anggaran (Muin, 2021). Ketersediaan pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia tak kalah penting dengan ketersediaan dana, dimana sumber sumber daya manusia ini merupakan ujung tombak terlaksananya kebijakan publik. Disebutkan dalam Giswanti (Giswanti, dkk., 2022) agar pelaksanaan program Makassar Recover dapat bergerak secara terencana, terstruktur, masif dan serentak, maka dibutuhkan tim besar gabungan antara tenaga ahli dan relawan yang telah dilatih sebanyak kurang lebih 16.000 orang. Terbagi dari sekitar 10.000 orang relawan detektor, sekitar 5000 orang Paramedis, sekitar 306 orang Dokter, sisanya adalah Manajemen Kelurahan dan manajemen kecamatan (seperti Binmas, Babinsa, Satpol PP, Danramil dan Polsek).

Tabel 7. Sumber Daya

Sumber daya	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Kota Makassar memiliki Kecukupan dana	2.78	80.56	11.11	5.56
Kebijakan memiliki ketersediaan pelaksana	2.78	80.56	11.11	5.56

Pelaksanaan kebijakan memiliki kecukupan peralatan	5.56	69.44	19.44	5.56
Memiliki ketersediaan informasi menyeluruh	8.33	63.89	22.22	5.56
Memiliki ketepatan penggunaan teknologi	2.78	69.44	22.22	5.56

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menggambarkan bahwa persepsi publik terhadap Pemkot Makassar dinilai memiliki kecukupan dana sebesar 80.56%. Responden juga menilai bahwa ketersediaan pelaksana/petugas mencukupi dalam menjalankan kebijakan Makassar Recover sebesar 80.56%. Pelayanan dan pelaksanaan kebijakan dinilai telah memiliki kecukupan peralatan sebesar 69.44%. Ketersediaan informasi telah dilakukan secara menyeluruh terkait kebijakan Makassar Recover sebesar 63.89%. Penggunaan teknologi dalam kebijakan Makassar Recover dinilai sebesar 69.44%. Sementara masih ditemukan persepsi yang tidak setuju bahwa Makassar memiliki kecukupan dana untuk melangsungkan kebijakan ini.

SIMPULAN

Kebijakan Makassar Recover merupakan salah satu contoh kebijakan yang dalam prosesnya banyak menuai pro-kontra dari berbagai aspek. Namun demikian hasil penelitian mengemukakan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recover cenderung positif dan mendapatkan dukungan publik. Hal ini terlihat pada indikator substansi kebijakan yaitu mayoritas berpendapat setuju pada Kebijakan Makassar Recover sesuai dengan kebutuhan pada masa pandemi dan kebijakan tersebut memiliki keselarasan dengan kebijakan lainnya. Pada indikator perilaku petugas pelaksana dimana mayoritas responden berpendapat setuju bahwa petugas pelaksana Kebijakan Makassar Recover di lapangan memiliki motivasi kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang dan memiliki kemampuan yang baik.

Pada faktor interaksi jejaring kerja kebijakan, persepsi publik berpendapat setuju memiliki kerjasama antar pelaksana yang baik dan hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan. Persepsi publik berpendapat setuju bahwa masyarakat menerima manfaat kegiatan Makassar Recover sekaligus masyarakat berkontribusi sesuai prosedur yang ada, serta Kota Makassar memiliki kecukupan dana, kebijakan memiliki ketersediaan pelaksana, pelayanan dan pelaksanaan kebijakan memiliki kecukupan peralatan, memiliki ketersediaan informasi menyeluruh terkait kebijakan Makassar Recover dan memiliki ketepatan penggunaan teknologi.

Masih ditemukannya persepsi publik yang tidak setuju terhadap indikator substansi kebijakan, petugas pelaksana. Interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan kecukupan dana dapat menjadi catatan Pemkot Makassar untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kebijakan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Daming, M. A., Agustang, A., Idhkan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5, No. 4, November 2021. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2580>
- Fauzan. (2021). *Tak Dukung Progam Makassar Recover Walikota Pecat Puluhan Lurah Dan Camat*. Makassar: <https://www.liputan6.com>. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/4603814/tak-dukung-progam-makassar-recover-wali-kota-pecat-puluhan-lurah-dan-camat>.

- Guntur, M. A., Nur, A. C., & Setiawan, T. (2022). Evaluation of Makassar City Government Recover Program. *IAPA International Conference and International Indonesia Conference on Interdisciplinary (IICIS)*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.702>
- Hamdi, M. M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia.
- Herlina, L. (2021). *Program Makassar Recover Berhasil Tekan Angka Kasus Covid-19*. Makassar: <https://mediaindonesia.com/nusantara>. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/434304/program-makassar-recover-berhasil-tekan-angka-kasus-covid-19>
- Indozone. (2021). Viral! Tim Detektor Makassar Buka Masker Hingga Berkerumun, Warga Ngeluh di Media Sosial. Indozone News. <https://news.indozone.id/news/911551239/viral-tim-detektor-makassar-buka-masker-hingga-berkerumun-warga-ngeluh-di-media-sosial>
- Islamy, I. M. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ismail Pane, d. (2021). *Desain Penelitian Mixed Method*. Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Mappiwali, H. (2021). *Warga Makassar Tolak Tim Detektor Covid Terancam Tak Dapat Layanan Pemkot*. Makassar: <https://news.detik.com/berita/>. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5641144/warga-makassar-tolak-tim-detektor-covid-terancam-tak-dapat-layanan-pemkot>
- Muin, A. (2021). *Polemik Kontainer Makassar Recover Dianggap Mubazir Dan Salah Tempat*. Makassar: <https://sulsel.idntimes.com>. Retrieved from <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/polemik-kontainer-makassar-recover-dianggap-mubazir-dan-salah-tempa>.
- Munsir, I. (2021). *15000 Detektor Covid Makassar Belum Digaji, Camat Diminta Segera Setor Data*. Makassar: <https://news.detik.com/>. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5767398/15000-detektor-covid-makassar-belum-digaji-camat-diminta-segera-setor-data>
- Pius A Partanto., M. D. (2021). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka
- Pomanto, M. R. (2021). *Makassar Recover: Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar*. Makassar: Pemerintah Kota Makassar.
- Riadi, M. (2020). *Persepsi (Pengertian, Proses, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi)*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html>.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Giswanti, W. A., Putri, I. R., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Meningkatkan Imunitas di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Program Makassar Recover Ecosystem. *PERSFEKTIF*, 11 (4) (2022). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6301>